



Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi

Volume 13 Nomor 2 Tahun 2023 : 1 - 15

<http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA>

DOI: 10.33592/jiia.v13i2.3822

p-ISSN p-2477-5088

e-ISSN e-2716-2621

Optimalisasi Penerapan *E-Government* Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)

Optimizing The Implementation Of E-Government In The SISABAR Program In An Effort To Improve Child Protection (Case Study Of The Office Of Women's Empowerment And Child Protection In Tangerang Regency)

¹Oktaviani; ²Agus Suherman; ³Pri Utami

¹²³Ilmu Administrasi Negara/Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik/Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang/Indonesia

Email: 1901010110@students.unis.ac.id

(Diterima: 26-08-2023; Ditelaah: 30-08-2023; Disetujui: 13-12-2023)

ABSTRAK (ABSTRACT)

E-Government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang program yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu bentuk penerapan *e-Government* ada pada Program SISABAR untuk menangani kasus pelaporan kekerasan pada anak agar anak merasa semakin terlindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan *e-Government* pada Program SISABAR serta mengetahui hambatan dan upaya pengoptimalisasian oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan di analisis menggunakan tiga indikator keberhasilan yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Government* di Kabupaten Tangerang pada Program SISABAR sudah dinilai optimal karena dinilai dari indikator pertama yaitu *support* yang diberikan sudah baik dilihat dari dukungan dinas terkait serta masyarakat. Namun, belum adanya landasan yuridis secara khusus yang mengatur Program SISABAR itu sendiri. Sementara untuk indikator *capacity* ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi sudah memadai, namun sumber daya finansial dalam pengalokasian jaringan internet menjadi penghambat pelaksanaan *e-Government*. Kemudian indikator *value* sudah baik dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh aparaturnya kecamatan dan dinas terkait serta masyarakat yang menjadi pelapor sudah menerima pelayanan dengan baik.

Kata kunci : *E-Government*, SISABAR, Kekerasan Anak

Oktaviani, Agus Suherman, Pri Utami (2023). *Optimalisasi Penerapan E-Government Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)*

A. PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan kita untuk meningkatkan pelayanan publik dengan cara yang lebih berpijak pada *good governance*. Ketika membangun *e-Government*, infrastruktur, fasilitas, pendanaan, dan sumber daya manusia yang diperlukan semuanya harus tersedia. Pelayanan publik yang lebih baik adalah salah satu tujuan mempraktekkan *e-Government* bagi organisasi pemerintah. Dalam rangka berinovasi dan meluncurkan inisiatif baru dalam birokrasi, pemerintah harus membuat komitmen yang kuat dalam hal ini. Pemanfaatan *e-Government* dalam birokrasi diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif reformasi birokrasi untuk pelayanan yang lebih baik. Penerapan *e-Government* sangat diperlukan guna memberikan pelayanan kepada publik demi terjalannya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. *E-government* sendiri juga membantu dalam pelaksanaan program sebuah instansi agar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang, telah menawarkan solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik agar lebih baik. Oleh karena itu untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet atau disebut dengan sistem *e-Government*.

Anak merupakan sumber daya bagi seluruh bangsa karena merupakan potensi generasi penerus untuk mewujudkan impian dan cita-citanya bagi kemajuan dan perkembangan bangsanya masing-masing. Setiap orang tua bisa bangga dengan anaknya jika mereka dididik sejak kecil hingga dewasa dan mampu melakukannya. Oleh karena itu, merupakan tanggung jawab setiap orang tua untuk membesarkan anak-anak mereka di lingkungan yang aman, bebas dari bahaya atau kejahatan. Anak di Indonesia diberikan hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi agar dapat berkembang dengan baik dan mendapatkan jaminan hak dari negara untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh anak di Indonesia. Kita semua tahu bahwa anak kecil rentan terhadap pengaruh luar yang mungkin berdampak negatif pada mereka dan bahkan mungkin orang lain, tetapi karena jiwa mereka masih dalam keadaan tidak stabil, mereka tidak dapat membedakan apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Seringnya penggunaan kekerasan, terutama terhadap anak, pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap kebebasan manusia, yang berarti pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan adalah tindakan yang tidak pernah dibenarkan dan tidak diragukan lagi bertentangan dengan semua hukum dan aturan nasional dan agama. Melalui pendidikan, kita dapat berusaha mencegah atau setidaknya mengurangi kegiatan yang mengarah pada tindakan kekerasan. Mengingat pendidikan mencakup proses pembentukan moral dan karakter anak, merupakan sarana yang dipandang cocok dan efektif.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang publik, bahkan di rumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya keluarga diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan

yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus tindak pidana terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang tidak dianggap tindak pidana.

Pemerintah Daerah harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang semakin serius menangani tindak kekerasan yang terjadi pada anak upaya yang dilakukan dengan menyediakan sarana yang dapat menampung aspirasi masyarakatnya yaitu SISABAR, SISABAR hadir untuk menciptakan layanan guna menerima informasi dan laporan terkait kekerasan anak di Kabupaten Tangerang.

Inovasi SISABAR merupakan sistem informasi digital yang bertujuan untuk layanan pengaduan kasus anak, pencegahan, dan memudahkan untuk melaporkan kasus kekerasan anak di Kabupaten Tangerang. Akar permasalahan terjadinya kekerasan terhadap anak meliputi permasalahan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Berbagai upaya penanggulangan kasus kekerasan anak harus dilakukan agar tidak bertambahnya korban kekerasan anak khususnya di Kabupaten Tangerang. SISABAR merupakan program baru pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, meski baru aktif pada tahun 2022, *website* pengaduan tersebut nampaknya berdampak signifikan terhadap peningkatan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk menggunakan layanan SISABAR ini, masyarakat dapat mengakses melalui *sisabar.tangerangkab.co.id..* Kemudian, pelapor akan diminta mengisi data berupa tanggal kejadian, nama pelapor, nomor telpon pelapor, jenis kasus dan beberapa hal lainnya. Selama beroperasi nya Program SISABAR sudah banyak kasus yang tercatat melalui *website sisabar.tangerangkab.go.id.* Dengan semakin banyak tercatatnya kasus kekerasan pada anak dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa Program SISABAR memberikan manfaat kepada masyarakat yang sudah mengetahui akan keberadaannya Program SISABAR.

Menurut hasil kajian dan riset dari *Harvard JFK School of Government* dalam Indrajit (2006:13-15) menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Ketiga elemen sukses tersebut adalah: *Support, Capacity, dan Value.*

1. *Support* (Dukungan), Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (*intent*) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep *e-Government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip *e-Government.*

2. *Capacity* (Kapasitas), Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan "impian" *e-Government* terkait menjadi kenyataan.
3. *Value* (Nilai), Berbagai inisiatif *e-Government* tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-Government* bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (*demand side*).

Berdasarkan pengamatan sementara dan fenomena yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang bahwa penerapan *e-Government* yang diberikan belum semaksimal mungkin karena SISABAR belum menjadi aplikasi melainkan masih berbasis *website*, selain itu juga masyarakat masih belum sepenuhnya mengetahui artinya hanya sebagian saja yang mengetahui adanya program SISABAR dan masyarakat belum paham serta belum mengerti untuk dapat mengisi *form* guna melaporkan kepada *website* SISABAR. Penelitian ini akan lebih menekankan secara terperinci bagaimana *e-Government* dalam membentuk pelayanan yang optimal serta *e-Government* berperan penting dalam menangani kasus kekerasan pada anak khususnya dengan adanya Program SISABAR ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi semua elemen terkait penerapan *e-Government* dalam lingkup pemerintahan khususnya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang agar lebih efektif dan efisien.

B. METODE (METHOD)

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) tahap, yaitu Reduksi Data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang beralamat pada Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720.

C. HASIL DAN DISKUSI (RESULT AND DISCUSSION)

Hasil (Result)

Pelaksanaan *e-Government* Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak di Kabupaten Tangerang

Program tersebut sudah ada sejak tahun 2019 namun efektif digunakan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 DPPPA melakukan penyempurnaan pada program tersebut secara teknis supaya dapat digunakan lebih maksimal. Dari tahun ke tahun sejak

diadakannya Program SISABAR kasus pelaporan kekerasan semakin banyak tercatat (terdata) dibandingkan belum diadakannya program tersebut. Dengan adanya program tersebut masyarakat semakin banyak yang terbantu. Terciptanya program tersebut bukan untuk menekan angka kekerasan yang semula ada menjadi tidak ada, melainkan untuk terus memantau seberapa banyak kenaikan kasus dari bulan sebelumnya hingga bulan selanjutnya, semakin banyak yang melaporkan kasus yang dialami, maka DPPPA semakin terbantu. Namun pada saat ini Program SISABAR hanya bisa di akses melalui *website* Kabupaten Tangerang belum menjadi aplikasi, DPPPA sudah ada wacana untuk menjadikan SISABAR tetapi itu masih jangka panjang. Masyarakat selaku pengguna SISABAR sudah semakin banyak yang menggunakan SISABAR ini karena sudah dilatihnya oleh operator kecamatan. Kerja sama antar stakeholder sangat mendukung adanya program SISABAR hal ini dibuktikan dengan meningkatnya masyarakat yang sudah bisa menggunakan website SISABAR ini sesuai kebutuhan. Program SISABAR merupakan program unggulan, karena program ini dapat memudahkan pelapor yang jauh dari DPPPA dengan adanya program SISABAR pelapor bisa mengadukan permasalahannya melalui website SISABAR. Program SISABAR menjadi program unggulan dan sudah banyak masyarakat yang bisa menggunakannya karena adanya sosialisasi dari DPPPA melalui kecamatan dan kegiatan sosialisasi ini dikatakan sudah berjalan secara menyeluruh. Sumber daya yang berkaitan dengan pelaksanaan program SISABAR secara keseluruhan berjalan sesuai dengan kebutuhan, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian khusus seperti psikolog untuk menangani korban sudah tersedia.

Tabel 1
Rekapitulasi Jenis Kasus 2022

No	Kecamatan	Jenis Kasus 2022	
		Kekerasan Seksual	Pelecehan Seksual
1	BALARAJA	3	2
2	CIKUPA	6	3
3	CISAUK	1	0
4	CISOKA	1	1
5	CURUG	11	3
6	GUNUNG KALER	1	0
7	JAYANTI	1	3
8	JAMBE	0	0
9	KELAPA DUA	3	4
10	KEMIRI	1	0
11	KOSAMBI	2	2
12	KRESEK	4	0
13	KRONJO	0	1
14	LEGOK	3	0
15	MAUK	4	2
16	MEKAR BARU	1	0
17	PAGEDANGAN	1	2
18	PAKUHAJI	1	0
19	PANONGAN	4	1
20	PASAR KEMIS	5	1
21	RAJEG	3	6
22	SEPATAN	1	1

23	SEPATAN TIMUR	0	2
24	SINDANG JAYA	4	1
25	SOLEAR	2	1
26	SUKADIRI	0	0
27	SUKAMULYA	2	0
28	TELUKNAGA	0	0
29	TIGARAKSA	6	1
Jumlah		71	37

Sumber : (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)

Hambatan Pelaksanaan *e-Government* Pada Program SISABAR di Kabupaten Tangerang

Program SISABAR masih memiliki keterbatasan, selain tidak adanya aplikasi dan hanya berbentuk website SISABAR ini kendalanya sinyal, masih terdapat kecamatan yang tidak terjangkau jaringan internet, kemudian sumber daya manusia yang belum terlatih mengoperasikan SISABAR menjadi kendala dalam berjalannya program SISABAR. Perbaikan fitur website yang lambat dari pihak stakeholder terkait juga menjadi faktor penghambat berjalannya program SISABAR. Program SISABAR dapat dikatakan sukses kalau pelapor SISABAR ini banyak, artinya masyarakat banyak yang memanfaatkan program ini. Manfaat dari adanya program SISABAR terdapat monitoring, pelapor bisa melacak sudah sampai di tahap apa pelaporan yang mereka buat.

Diskusi (*Discussion*)

Support (Dukungan)

1. Disepakatinya Pelaksanaan *e-Government*

Dalam pelaksanaan *e-Government* ini melalui *website* SISABAR (Sistem Informasi Sayang Barudak) di Kabupaten Tangerang ini tentu mendukung adanya upaya pelaporan kasus kekerasan pada anak ataupun kekerasan lainnya melalui *online*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencanangkan Program SISABAR ini sangat membantu semua pihak termasuk Dinas terkait dan juga masyarakat dan mendapat masukan yang positif dari berbagai kalangan yang merasa terbantu dengan adanya Program SISABAR. Serta memudahkan pemerintah dalam mencadangi data kasus pelapor yang tidak lagi manual. Maka dengan ini, dukungan yang diberikan terkait pelaksanaan *e-Government* sangat mendukung dan bernilai positif dan diterima dengan baik oleh semua kalangan. Dengan ini pemerintah terkait mengharapkan Program SISABAR terus berjalan sesuai tujuan yang akan dicapai kedepannya.

2. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain)

Program ini sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan yang pelapor butuhkan karena SDM yang dibutuhkan seperti operator di setiap kecamatan maupun pada Dinas terkait, sudah dilakukannya pelatihan-pelatihan di Kecamatan. Dengan

adanya pemilihan operator yang harus benar-benar mengerti komputer maka SDM yang dimiliki makin berkualitas karena sudah sejalan dengan tujuan yang akan dicapai. Begitu pula dalam bentuk pendanaan, karena dengan dana yang tersalurkan yaitu dana APBD dengan tepat maka kendala yang dialami selama Program SISABAR berjalan langsung teratasi. Anggaran ini juga merupakan termasuk dalam proses pengoptimalisasian penerapan Program SISABAR.

3. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung untuk mengembangkan e-Government

Dibangunnya infrastruktur dan superstruktur pendukung terkait Program SISABAR dapat diketahui bahwa belum ada payung hukum yang dilandaskan pada Program SISABAR, karena Program SISABAR ini awal mulanya merupakan program utusan yang ternyata menjadi salah satu program unggulan dari 15 program yang ada di Kabupaten Tangerang. Untuk infrastruktur sendiri, sudah memadai baik itu dalam bentuk *hardware* maupun *software*, karena *website* SISABAR ini terus melakukan *updating* guna terus menyempurnakan Program SISABAR. Untuk *hardware* yang dimiliki DPPPA yang ditujukan untuk Program SISABAR sudah terpenuhi mulai dari jaringan internet maupun laptop untuk memudahkan para operator memasukkan data.

4. Disosialisasikannya konsep *e-Government* secara merata, kontinyu, konsisten, dan menyeluruh

Strategi yang diciptakan untuk mensosialisasikan Program SISABAR yaitu adanya rutinitas sosialisasi yang dilakukan pihak DPPPA untuk memudahkan pelaporan kekerasan anak sehingga masyarakat juga memahami betapa pentingnya jika mengalami kekerasan pada anak. Sosialisasi ini berperan sangat penting karena tanpa adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat program ini tidak akan berkembang. Pihak dinas juga memanfaatkan media baca yaitu *leaflet* yang dibagikan kepada anak-anak sekolah maupun pada kalangan lainnya. Maka sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah berjalan dengan baik, karena seiring berjalannya waktu pengguna SISABAR semakin banyak.

Capacity (kapasitas)

Kapasitas atau kemampuan merupakan salah satu tolok ukur berjalannya suatu program. Kapasitas yang dimaksud adalah kapasitas penyediaan sumber daya finansial, kapasitas ketersediaan teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia. Ada tiga hal yang harus dimiliki guna terlaksananya *e-Government*; (1). ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-Government* yang berkaitan dengan finansial (2). Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai (3). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-Government* dapat sesuai. *Capacity* atau Kapasitas dalam pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Tangerang khususnya dalam Program SISABAR mengenai sumber daya manusia maupun sumber daya finansial dinilai sudah sangat baik. Terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu operator yang telah

diberikan pelatihan, sehingga operator tidak lagi kebingungan dalam proses pengoperasian SISABAR. Lalu terkait dengan anggaran yang diberikan kepada DPPPA yang bersumber dari APBD sudah memadai dan sudah tercukupi sejauh ini.

Value (Manfaat)

Kunci kesuksesan sebuah pelaksanaan *e-Government* dinilai dari tingkat kebermanfaatannya yang dihasilkan terutama bagi masyarakat sebagai pengguna. Pelaksanaan *e-Government* dalam pelaporan kasus kekerasan pada anak dilihat dari segi manfaat yang sudah dirasakan langsung oleh pelapor dalam hal ini yaitu masyarakat, dimana masyarakat tidak lagi datang langsung ke kantor DPPPA untuk melaporkan kasus, melainkan dapat dilaporkan *via online* selagi terjangkau internet. Manfaat dari Program SISABAR ini sangat besar karena banyak yang sudah terjaring oleh DPPPA yang semula tidak diketahui sekarang menjadi diketahui, karena DPPPA tidak menekan jumlah kekerasan melainkan ingin mengetahui seberapa banyak kekerasan yang ada setelah itu dilakukan proses pendampingan kasus hingga selesai. Dan DPPPA semakin mudah melakukan rekapitulasi kekerasan yang dialami oleh masyarakat pelapor pada 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Selain itu DPPPA merasa terbantu karena pendataan tidak lagi dilakukan manual melainkan hanya mengakses *website* SISABAR tersebut. *Value (Manfaat)* dari adanya Program SISABAR di Kabupaten Tangerang sudah dirasakan oleh masyarakat dengan baik, masyarakat pelapor atau terlapor lebih mudah dijangkau. Oleh karena itu pelaksanaan *e-Government* melalui Program SISABAR dinilai berhasil karena memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh kalangan masyarakat maupun dinas terkait.

Hambatan Serta Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan *e-Government* Pada Program SISABAR di Kabupaten Tangerang

Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *e-Government* pada Program SISABAR yaitu minimnya akses jaringan internet belum merata. Seperti yang diketahui, *website* dapat berjalan dengan lancar jika adanya jaringan internet yang mendukung. Jaringan internet merupakan faktor utama dalam menjalankan suatu program berbasis *online*. Program ini ditujukan pada 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Tangerang, tidak semua kecamatan memiliki akses internet yang baik, yang terkendala jaringan salah satunya yaitu Kecamatan Gunung Kaler. Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan jaringan internet yang kurang memadai. Maka dari itu masyarakat yang terdampak jaringan internet, mereka tidak mengakses Program SISABAR jika ada kasus pelaporan kekerasan, melainkan mereka langsung menghubungi kecamatan selanjutnya pihak kecamatan mengarahkan kepada relawan kecamatan tersebut.

Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan *e-Government* pada Program SISABAR

Jaringan internet merupakan sebuah kunci berjalannya *e-Government*, oleh karena itu penyediaan akses jaringan internet secara merata dan menyeluruh yang termasuk dalam kategori sumber daya finansial berupa penyediaan fasilitas akses internet gratis seperti *wifi* yang harus terpasang pada kecamatan yang terdampak jaringan yang belum

memadai. Karena jika setiap rumah pada kecamatan yang terdampak di berikan fasilitas *wifi* sangat tidak mungkin. Maka dari itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan dipasangkannya *wifi* pada setiap RW yang terdampak serta melakukan pengecekan atau *controlling* serta pelaporan kondisi fasilitas internet secara rutin. Upaya tersebut diharapkan sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mengatasi hambatan yang terjadi.

D.KESIMPULAN (CONCLUSION)

E-Government yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sudah dinilai optimal. Mengingat Program SISABAR merupakan program yang baru dibuat, tetapi sudah berjalan sesuai apa yang diharapkan. Dukungan yang diberikan oleh dinas terkait, pemerintah, serta masyarakat juga sudah sangat baik, karena semua pihak mendukung dengan adanya Program SISABAR. Selain itu kapasitas yang disediakan oleh dinas terkait sudah memadai mulai dari sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dan sudah ada pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kecamatan. Sumber daya finansial juga sudah tercukupi untuk anggaran yang tersalurkan dengan baik menggunakan dana APBD, namun hambatan yang terjadi ada pada sebagian kecamatan yang masih minim jaringan internet karena tidak semua kecamatan terjangkau jaringan internet. Serta untuk sumber daya infrastruktur sudah terpenuhi karena sesuai dengan kebutuhan. Manfaat yang didapat untuk semua pihak sudah tersampaikan dengan baik, mengingat banyak masyarakat yang sudah banyak menggunakan program tersebut dan pihak dinas yang merasa diuntungkan dalam proses pencatatan data yang tidak lagi manual. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak terkait untuk mensosialisasikan program tersebut sudah terpenuhi karena sosialisasi dilakukan rutin kepada masyarakat jika ada kegiatan yang berhubungan dengan anak serta pihak dinas terkait jika bekerja sama dengan sekolah-sekolah, membuat *leaflet* supaya sosialisasi yang disampaikan bisa tersampaikan kepada semua kalangan khususnya para orang tua.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Andi Rahmayanti Ramli, A. A. P. A., Aras, R. A., & Mubarak, dan H. (2021). Penerapan Sistem Informasi Dalam Optimalisasi Pelaporan Tanaman Pangan Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Dinamika Pengabdian, Vol. 7*, 183–190.
- Andri Irawan. (2018). *Sistem Pelayanan Publik Berbasis E-Government pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. 7 No 01*, 20–37.
- Anggun Pertiwi, Herman Dema, Ahmad Mustanir, E. A. (2021). Penerapan E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan Desa (Studi Pada Pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA |, Volume 9*, 131–138.
- Atik Andhayani. (2020). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah: e-Budgeting untuk Oktaviani, Agus Suherman, Pri Utami (2023). *Optimalisasi Penerapan E-Government Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)*

- Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Riset Dan Aplikasi*, 183-193.
- Budianto, A., Engkus, & Yusuf, D. (2022). Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi SIMKAH Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage Kota Bandung. *Jurnal Hospitality*, 11(1), 4-5.
- Butsi, F. I. (2019). Memahami Pendekatan Positivistis, Konstruktivistis Dan Kritis Dalam Metode Penelitian Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 2(No.1). <https://www.ejurnal.stikpmedan.ac.id>
- Choiriyah, I. U. (2020). Penerapan E-Government Melalui M-Bonk di Kabupaten Sidoarjo. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 126-135.
- Haris Setyawan, I. W. (2020). *Sistem Informasi Berbasis Web Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Pengelolaan Pemerintahan Desa Barepan*.
- Ibad F, S., & Lolita, Y. W. (2020). *Pengembangan Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Pada Layanan Smart city Kabupaten Situbondo)*. Volume 6(Nomor 2).
- Ibrahim, Wahyu Hidayat Maita, I. (2017). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Web Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. *Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 3, 17-22.
- Ida Syafriyani, Y. P. Z. (2018). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian: Studi Di Bkpsdm Kabupaten Sumenep. (*Journal of Public Sector Innovations*), Vol. 3, 28-34.
- Nur, M. (2021). *Faktor Sukses Penerapan E-Government Dalam Program Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Di Kabupaten Gowa*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.
- Nurdiani, Y., Ibrahim, A., Ambarita, A., & Abdullah, S. D. (2022). *Membangun E-Government Sistem Informasi Pemerintah Desa Berbasis Web Di Pulau Maitara*. Volume 7, 49-58.
- Nurita, R. F. (2016). Penerapan Layanan E-Government Dalam Perwujudan Good Governance Di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7(Vol.7, No.2), 238-246.
- Nurlukman, A. D. (2018). e-Procurement: Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis e-Government di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.264>
- Reza, F., & Putra, A. D. (2021). Sistem Informasi E-Smile (Elektronik Service Mobile) (Studi Kasus: Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang). *Teknologi Dan Sistem Informasi*, Vol. 2, 56-65.
- Rona Putra. (2022). Optimalisasi Administrasi Tata Naskah Dinas Melalui Penerapan Sistem Informasi Pada Perguruan Tinggi. *JARINGAN SISTEM INFORMASI ROBOTIK (JSR)*, volume 6.
- Sabino Mariano. (2019). *Penerapan e-Government dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo*.
- Suciska, W. (2016). Optimalisasi Penerapan E-Government Melalui Media Sosial Dalam Mewujudkan Good Government. *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi 2016*, 2(6), 374-389. <http://repository.lppm.unila.ac.id/2948/1/303-525-1-PB.pdf>
- Suprihatmi Sri Wardiningsih. (2020). *Perkembangan Teknologi Dan Sistem Informasi Untuk Peningkatan E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Vol. 7.
- Widodo, N. (2016). Pengembangan e-Government Di Pemerintahan Daerah Dalam Rangka
- Oktaviani, Agus Suherman, Pri Utami (2023). *Optimalisasi Penerapan E-Government Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)*

Mewujudkan Smart City(Studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol 2(No. 4).*

Yeni Denisa Lestari, Joko Tri Nugraha, N. M. F. (2019). Pengembangan E-Government Melalui Layanan Aspirasi Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. XVI(Vol. XVI No.2), 163-178.*

Yenny MarthaA Diana Nugraha. (2021). *Penerapan E-Government Melalui Sieka Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.* UNIVERSITAS NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Buku Elektronik (e-book)

Alreiskan Roudlotul Himah, dkk. (2021). *Sebuah Bunga Rampai Akuntan & Manajemen Sektor Publik* (W. A. Wuryantoro, Maharani (ed.)). Global Aksara Pers.

Darius Antoni, Ph.D., Muhammad Izman, Herdiansyah, Ph.D., Muhamad Akbar, M. I. T. (n.d.). *E-Government Berbasis Information Technology Infrastructure* (E. Nindya (ed.)). CV. MITRA MANDIRI PERSADA.

Dr. Harbani Pasolong, M. S. (2019). *Teori Administrasi Publik* (Cetakan Ke). Alfabeta.

DR. Mohammad Muchlis Solichin. (2021). *Paradigma Konstruktivisme Dalam Belajar Dan Pembelajaran* (M. P. Dr. H. Ali Nurhadi (ed.)). Duta Media Publishing.

Publikasi Elektronik

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang. (2019). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Pegawai.*

Diskominfo. (2020). *Web Terpadu Kabupaten Tangerang.* <https://tangerangkab.go.id/>

DP3A Pemerintah Kabupaten Tangerang. (n.d.). SISABAR. <https://sisabar.tangerangkab.go.id/r=1.25#imgrc=RD9c0ejQjfF8zM>

Oktaviani, Agus Suherman, Pri Utami (2023). *Optimalisasi Penerapan E-Government Pada Program SISABAR Dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang)*